

**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
OLEH DINAS SOSIAL KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Riska Rahim Putri

NPP. 30.1223

Asal Pendaftaran Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

[*riskarahim33@gmail.com*](mailto:riskarahim33@gmail.com)

Pembimbing Skripsi: Dr. Drs. Kusworo, M.Si

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): The purpose of the researchers to conduct this research was motivated by the high poverty rate in Indonesia, one of them in Sidenreng Rappang Regency where the problem of poverty has an influence on limited access economically, health, socially, educationally, politically, culturally and community participation. In efforts to reduce poverty at the regional level, the Regional Government of Sidenreng Rappang Regency implements the Family Hope Program (PKH) by the Ministry of Social Affairs. **Purpose:** This study aims to determine the Implementation of the Family Hope Program (PKH) in Sidenreng Rappang Regency, the factors that become obstacles to the implementation of the Family Hope Program (PKH) and the efforts made to overcome obstacles in the implementation of the Family Hope Program (PKH) by the Social Service Sidenreng Rappang Regency. **Method:** The research method used is descriptive qualitative research method. Data obtained through observation, interviews and documentation then data analysis techniques using data reduction, data presentation and drawing conclusions. **Results:** The results of this study indicate that the Family Hope Program (PKH) has been implemented in accordance with regulations and can help people belonging to the category of Very Poor Households (RTSM) to be released from the bondage of poverty by providing cash assistance 4 times a year in education and health. **Conclusion:** Based on the research that has been carried out, the researchers conclude that the Implementation of the Family Hope Program (PKH) in Sidenreng Rappang Regency has been carried out according to the rules. However, there are still obstacles, namely the low awareness of KPM on socialization activities, the slow process of updating data, the timely disbursement of funds and the limited number of PKH assistants. Efforts made in this regard are increasing the intensity of socialization and ongoing coordination with PKH assistants and validating data so that assistance is right on target and error data is resolved.

Keywords: Implementation, Family Hope Program (PKH), Poverty

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Tujuan dari peneliti melakukan penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka kemiskinan di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Sidenreng Rappang dimana permasalahan kemiskinan memberikan pengaruh terhadap keterbatasan akses secara ekonomi, kesehatan, sosial, pendidikan, politik, budaya dan partisipasi masyarakat. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Kementerian Sosial. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Sidenreng Rappang, Faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Upaya yang dilakukan dalam mengatasi penghambat dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dekumentasi kemudian Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) telah dilaksanakan sesuai dengan atura dan dapat membantu masyarakat yang termasuk kategori Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) untuk dapat terlepas dari jeratan kemiskinan dengan memberikan bantuan tunai sebanyak 4 kali dalam setahun di bidang pendidikan dan kesehatan. **Kesimpulan:** Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti menyimpulkan bahwa Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Sidenreng Rappang telah dilaksanakan sesuai dengan aturan. Namun masih terdapat hambatan yakni rendahnya kesadaran yang dimiliki oleh KPM pada kegiatan sosialisasi, lambatnya proses pemutakhiran data, pencairan dana yang tidak tepat waktu serta terbatasnya jumlah pendamping PKH. Upaya yang dilakukan dalam hal ini yaitu meningkatkan intensitas sosialisasi dan koordinasi berkelanjutan dengan pendamping PKH serta melakukan validasi data agar bantuan tepat sasaran dan data eror terselesaikan.

Kata Kunci: Implementasi, Program Keluarga Harapan (PKH), Kemiskinan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang menduduki urutan keempat dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia yakni lebih dari 273.532.615 juta jiwa. Sebagai Negara berkembang dengan populasi yang besar, terdapat berbagai macam kondisi sosial masyarakat di Indonesia. Salah satu kondisi sosial masyarakat yang menjadi permasalahan yakni di bidang sosial ekonomi khususnya masalah Kemiskinan.

Permasalahan kemiskinan memberikan pengaruh serta dampak terhadap tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia yakni melindungi segenap bangsa dan terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Permasalahan kemiskinan yang terjadi di Indonesia bersifat kompleks dan multidimensional karena berkaitan dengan keterbatasan akses secara ekonomi, sosial, kesehatan, budaya, politik, dan partisipasi masyarakat. Kompleksitas masalah kemiskinan membutuhkan upaya penanggulangan yang menyeluruh sehingga mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat serta dilaksanakan secara terorganisir dan berkelanjutan agar terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia.

Salah satu prioritas nasional bangsa yang ditetapkan oleh pemerintah yakni penanggulangan kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan merupakan kewenangan dan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah serta masyarakat. Salah satu program Penanggulangan Kemiskinan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yakni program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga yang tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH).

Program Keluarga Harapan dilatarbelakangi karena adanya permasalahan terkait kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah dan jumlah penduduk miskin yang besar. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan prioritas nasional yang dititikberatkan pada meratanya jangkauan pelayanan Pendidikan dan Kesehatan. Program PKH merupakan program perlindungan sosial dengan memberikan bantuan dalam bentuk tunai kepada keluarga yang masuk kategori Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan pada bidang Pendidikan dan Kesehatan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pernyataan terkait dengan angka kemiskinan yang masih terbilang banyak merupakan kondisi yang dibenarkan oleh Badan Pusat Statistika. Tercatat jumlah penduduk miskin pada September 2020 sebesar 27,55 juta orang, meningkat 1,13 juta orang terhadap Maret 2020. Kemudian pada September 2021 jumlah penduduk miskin menurun menjadi 26,50 juta orang. Jumlah penduduk miskin pada level

nasional cenderung mengalami penurunan. Adanya kenaikan persentase kemiskinan di tahun 2020 salah satunya disebabkan oleh pandemi Covid-19. Perubahan yang naik turun juga di alami di Provinsi Sulawesi Selatan, salah satunya di Kabupaten Sidenreng Rappang. Data jumlah penduduk miskin Kabupaten Sidenreng Rappang dihadirkan dalam gambar berikut

Gambar 1.1
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017-2021



Sumber: Badan Pusst Statistik Kabupaten Sidenreng Rappang, 2021

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa pada periode 2017-2021, kenaikan jumlah penduduk miskin terjadi pada tahun 2020 karena adanya pandemi Covid-19.

Kewenangan dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan penanggulangan kemiskinan dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam penanggulangan kemiskinan, perumusan kebijakan dan program terus dilakukan. Salah satunya adalah program Penanggulangan Kemiskinan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yakni Program Keluarga Harapan (PKH) yang memberikan bantuan dalam bentuk tunai. Dalam pelaksanaannya di Kabupaten Sidenreng Rappang masih terdapat hambatan yakni belum tepat pada target yang dituju serta adanya keterlambatan dalam penyaluran bantuan. Hal ini terjadi karena masih terdapat masyarakat yang memenuhi syarat sebagai penerima bantuan tetapi tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial. Berikut merupakan data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) tahun 2019-2021.

Tabel 1.1
Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
Tahun 2019-2021

No	Jenis PPKS	2019	2020	2021
1	Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)	11.051 KK	4.272 KK	5.476 KK
2	Rumah Tangga Miskin (RTM)	2.874 KK	5.602 KK	8.840 KK
3	Penerima PKH	7.704 KPM	7.614 KPM	7.593 KPM

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang

Berdasarkan data di atas, pada tahun 2019-2020 keluarga yang tergolong RTSM mengalami penurunan sebanyak 6.779 dan penerima PKH juga mengalami penurunan. Tetapi, di tahun 2020-2021 mengalami kenaikan yang semula 4.272 RTSM menjadi 5.476 RTSM. Hal ini disebabkan karena adanya kebijakan pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19 dengan membatasi kerumunan melalui pengurangan jumlah pekerja dengan cara diberhentikan atau dirumahkan. Hal ini berdampak pada aspek pendapatan masyarakat sehingga angka kemiskinan meningkat. Data diatas juga menunjukkan walaupun jumlah RTSM meningkat pada tahun 2020-2021 akibat pandemi Covid-19 tidak membuat penerima PKH mengalami peningkatan, justru sebaliknya jumlah penerima PKH mengalami penurunan karena adanya realokasi dan refocusing anggaran belanja APBN dan APBD untuk penanganan pandemi Covid-19 di setiap daerah.

Berdasarkan data yang disajikan diatas dapat dikatakan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Sidenreng Rappang telah dilaksanakan dan tersalurkan pada masyarakat untuk menanggulangi masalah kemiskinan, akan tetapi tidak bisa dipungkiri dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah, Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari tiga penelitian terdahulu sebagai referensi dan perbandingan dalam penelitian yang akan dilakukan. Penelitian Dyah Ayu Virgoreta (2014) berjudul Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat pada Desa Beji Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban berkesimpulan bahwa dalam pelaksanaan PKH terhadap kondisi sosial ekonomi RTSM telah mengalami perubahan dari segi pendidikan dan kesehatan. Penelitian Firma Kusuma Indrayani (2014) berjudul Efektivitas Program Keluarga Harapan di Desa Sugihwaeas Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun berkesimpulan bahwa dari pengolahan data, kriteria penilaian masing-masing item pertanyaan dalam angket didominasi oleh penilaian efektif dan sangat efektif sehingga dapat dikatakan bahwa Program Keluarga Harapan Di Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun sudah berjalan efektif. Penelitian Edi Suharto (2015) berjudul Peran Perlindungan Sosial dalam Mengatasi Kemiskinan di Indonesia: Studi Kasus Program Keluarga Harapan (PKH) berkesimpulan bahwa Penerapan Program Keluarga Harapan di Indonesia menunjukkan kontribusi yang signifikan bagi pengetas angka kemiskinan, khususnya dalam meningkatkan partisipasi sekolah para penerima manfaat pada pendidikan dasar dan akses mereka terhadap pelayanan kesehatan.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti menggunakan tiga jurnal ilmiah sebagai referensi dan perbandingan dalam penelitian yang akan dilakukan. Adapun persamaan dari ketiga karya tulis ilmiah tersebut dengan karya tulis peneliti yaitu sama-sama membahas tentang Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Penanggulangan Kemiskinan. Sedangkan perbedaan dari ketiga karya tulis ini yaitu terletak pada lokus penelitian. Dalam penelitian Dyah Ayu (2014) memfokuskan penelitian pada tingkat desa, penelitian Edi Suharto (2015) memfokuskan penelitian di tingkat nasional serta penelitian Firma Kusuma (2014) menggunakan teori efektivitas dengan lokus penelitian pada tingkat desa.

1.5. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Program Keluarga Harapan dalam penanggulangan kemiskinan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang, Faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Upaya yang dilakukan dalam mengatasi penghambat dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).

II. Metode Penelitian

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode kualitatif untuk menghasilkan solusi atau pemecahan masalah atas masalah yang diselidiki, pendekatan adalah serangkaian kegiatan pengamatan, studi, analisis yang dilakukan oleh seorang peneliti terhadap suatu objek. pendekatan penelitian dijadikan sebagai rancangan guna menentukan prosedur dalam pelaksanaan penelitian. Penggunaan pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif seperti yang disampaikan oleh Moleong (2010) menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode dengan prosedur penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk menyelidiki peristiwa atau proses secara mendalam guna mendapatkan hasil data deskriptif berupa rangkaian kata dari individu-individu dan perilaku dari hasil pengamatan di lapangan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif induktif. Sugiyono (2015) mengemukakan bahwa Metode deskriptif merupakan metode yang bertujuan untuk menjelaskan serta memaparkan berbagai data dan/atau kondisi yang telah ditemukan tanpa bermaksud menarik kesimpulan yang bersifat secara umum. Guna mendapatkan suatu data dan informasi relevan dan akurat, maka perlu adanya partisipasi peneliti di lapangan dengan pengamatan dan pengkajian secara sistematis.

Berdasarkan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, maka dalam pengumpulan data peneliti menggunakan pendekatan induktif. Menurut Nazir (2011), pendekatan induktif adalah sebuah proses berpikir dalam menyuguhkan alasan mulai dari pernyataan-pernyataan relevan sehingga terbentuk pernyataan yang umum.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara dengan jenis wawancara semi terstruktur dimana sebelumnya peneliti telah menyusun pedoman wawancara sebagai acuan secara garis besar dalam melakukan wawancara namun dalam pelaksanaannya peneliti juga akan menanyakan hal yang dianggap penting serta memiliki keterkaitan dengan pokok penelitian tetapi tidak tercantum pedoman wawancara yang sudah tersusun. Tidak lupa dalam pelaksanaan wawancara menyiapkan alat bantu guna mencatat hasil wawancara untuk menghindari hilangnya data yang sudah diperoleh.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini menggunakan bentuk observasi partisipasi dengan sifat moderat, di mana peneliti terlibat dalam keseharian informan, ikut serta dalam beberapa kegiatan namun tidak semuanya. Peneliti melakukan pengamatan langsung di Dinas Sosial guna mengetahui Implementasi Program Keluarga Harapan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Pengumpulan informasi diperoleh melalui terjun langsung di lapangan dalam rangka pengamatan *riil* terhadap kejadian atau peristiwa di lokasi penelitian dengan harapan menghasilkan data yang lebih lengkap.

Dijelaskan oleh Simangunsong (2017) bahwa dokumentasi merupakan kegiatan dalam penyediaan berbagai dokumen atau arsip dengan memanfaatkan bukti akurat berdasarkan pencatatan dari berbagai sumber informasi. Jenis dokumen dapat berupa tulisan, gambar, maupun karya seni. Selain itu, dokumen juga diklasifikasikan dalam dua bentuk, yaitu dokumen sekunder meliputi dokumen-dokumen pemerintah pusat maupun daerah yang berasal dari naskah akademis dan dokumen primer meliputi dokumen yang memiliki hubungan langsung dengan peristiwa penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan gambaran umum terkait Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Dinas Sosial dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sidenreng Rappang, baik dokumentasi dalam bentuk foto maupun berbagai literatur diharapkan mampu membantu peneliti memberikan teori dan bukti valid yang memiliki kegunaan sebagai data pelengkap data primer dari pelaksanaan wawancara sebelumnya sehingga penelitian dapat mencapai sasaran.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, penelitian ini menggunakan rangkaian metode wawancara, observasi dan dokumentais dalam proses pengumpulan data sehingga diharapkan akan terlaksana pengumpulan data yang efektif serta efisien.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Penanggulangan Kemiskinan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang

Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Penanggulangan Kemiskinan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang dianalisis berdasarkan 2 indikator implementasi menurut Merille S. Grindle sebagai berikut:

a) Isi Kebijakan (*Content Policy*)

1) Kepentingan Kelompok Sasaran yang Mempengaruhi

Kepentingan yang mempengaruhi dalam pelaksanaan implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sidenreng Rappang ialah kepentingan dari penerima program Keluarga Harapan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang. Kepentingan ini meliputi pengurangan angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin.

2) Jenis Manfaat

Manfaat dari adanya Program Keluarga Harapan dapat dilihat dari banyak keluarga penerima manfaat kehidupannya menjadi lebih baik bahkan bisa terlepas dari jerat kemiskinan selain itu juga mendorong keluarga menjadi lebih mandiri serta bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, serta membantu pembiayaan sekolah dan layanan kesehatan.

3) Derajat Perubahan yang Diharapkan

Derajat perubahan yang ditargetkan dalam RPMJM tahun 2022-2024 yakni sebesar 7% hingga 6,5% belum mampu dicapai oleh Kabupaten Sidenreng Rappang, karena saat ini tingkat kemiskinan di Kabupaten Sidenreng Rappang baru mencapai 12,96%. Untuk mencapai target kemiskinan yang ditentukan tersebut, salah satunya adalah PKH.

4) Letak Pengambil Keputusan

Letak pengambilan keputusan dalam Implementasi Program Keluarga Harapan di Kabupaten Sidenreng Rappang perumusan ini tidak banyak dilakukan oleh pihak Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang, melainkan keputusannya dilakukan oleh pusat. Sehingga pihak Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang hanya menjalankan program sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan.

5) Pelaksana Kegiatan

Pelaksana kegiatan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Sidenreng Rappang diantaranya ialah UPPKH Pusat, UPPKH Kabupaten/Kota dan UPPKH Kecamatan (pendamping PKH), serta melibatkan berbagai unsur Departemen pemerintah, pihak BPS, serta PT Pos Indonesia.

6) Sumber Daya yang Digunakan

Sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan PKH di Kabupaten Sidenreng Rappang sudah cukup memadai, karena penentuan besaran bantuan per KPM sudah ditentukan oleh pusat. Dalam menentukan besaran bantuan tersebut pusat telah merata-rata besar pendapatan KPM per tahunnya.

b) Lingkungan Kebijakan Kebijakan (*Context of Policy*)

1) Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor yang Terlibat

Sebagai aktor pelaksana program keluarga harapan di Kabupaten Sidenreng Rappang, Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang melaksanakan berbagai strategi untuk mengimplementasikan program ini diantaranya dengan selalu berkoordinasi dengan pendamping PKH juga dengan gencar melakukan sosialisasi

2) Karakteristik Lembaga dan Penguasa

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) juga dipengaruhi oleh karakteristik lembaga dan penguasa. Terdapat tiga lembaga yang terlibat dalam kebijakan ini, yaitu Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai implementor, pendamping PKH sebagai pelaksana kebijakan, dan masyarakat sebagai sasaran kebijakan.

3) Kepatuhan dan Adanya Responden Pelaksana

Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang sangat patuh terhadap kebijakan dan aturan yang ditetapkan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Hal ini tercermin dari upaya yang dilakukan dalam mengimplementasikan program dengan baik serta memberikan laporan dan evaluasi secara berkala. Selain itu, Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang juga mengharapkan para KPM mematuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam program ini.

3.2. Hambatan dalam Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sidenreng Rappang

Proses Implementasi Program Keluarga Harapan dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sidenreng Rappang telah berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan namun dalam pelaksanaannya tentu menemui beberapa hambatan, diantaranya adalah:

- a) Masih rendahnya kesadaran KPM untuk ikut kegiatan sosialisasi program PKH. Berbeda dengan pencairan, para KPM akan datang berbondong-bondong untuk pencairan
- b) Lambatnya proses pemutakhiran data KPM serta terjadi error pada data yang berimbas pada status invalid yang nantinya akan berpengaruh pencairan bantuan yang diterima.
- c) Pencairan dana yang tidak tepat waktu serta terbatasnya jumlah pendamping PKH, sehingga implementasi PKH kurang efektif.

3.3. Upaya dalam Mengatasi Hambatan

Pemerintah melalui Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang senantiasa berupaya agar hambatan dalam proses implementasi Program Keluarga Harapan

dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sidenreng Rappang ini dapat diatasi dengan baik. Adapun upaya-upaya yang dilakukan pemerintah yakni:

- a) Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang meningkatkan intensitas sosialisasi dan koordinasi dengan pendamping PKH.
- b) Melaksanakan pendampingan rutin setiap bulan kepada pendamping PKH di Kantor Dinas Sosial.
- c) Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan validasi/verifikasi data agar bantuan tepat sasaran dan data error terselesaikan.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Sidenreng Rappang telah dilaksanakan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala seperti kurangnya kesadaran keluarga penerima untuk ikut keguatan sosialisasi, lambatnya proses pemutakhiran data sehingga berpengaruh pada pencairan bantuan dan pencairan dana yang tidak tepat waktu serta keterbatasan jumlah pendamping PKH. Berbeda dengan penelitian Edi Suharto (2015) yang meneliti tentang Peran Perlindungan Sosial dalam Mengatasi Kemiskinan di Indonesia: Studi Kasus PKH yang memfokuskan penelitian di tingkat nasional dengan hasil bahwa Penerapan PKH di menunjukkan kontribusi yang signifikan untuk mengetas angka kemiskinan, khususnya dalam meningkatkan partisipasi sekolah pada pendidikan dasar dan akses pelayanan kesehatan.

Penulis dalam penelitian ini ingin mengetahui bagaimana implementasi PKH di Kabupaten Sidenreng Rappang apakah dengan adanya PKH dapat mengurangi tingkat kemiskinan yang ada sama halnya dengan temuan Dyah Ayu (2014) dimana temuan ini juga membahas mengenai Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) akan tetapi berfokus pada tingkat desa. Penulis dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi guna mengetahui bagaimana dampak pada masyarakat, individu ataupun kelompok serta perubahan apa yang terjadi dan bagaimana penerimaan masyarakat, berbeda dengan temuan penelitian Firma Kusuma (2014) meskipun membahas PKH akan tetapi menggunakan teori efektivitas dengan lokus penelitian pada tingkat desa.

IV. Kesimpulan

Implementasi Prpgram Keluarga Harapan dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sidenreng Rappang telah terlaksana dengan baik. Tetapi, masih terjadi kendala. Berdasarkan 2 indikator menurut Grindle yakni Isi Kebijakan dan Konteks Kebijakan, disimpulkan bahwa hasil pelaksanaan Program PKH di Kabupaten Sidenreng Rappang:

a) Dampak pada Masyarakat, Individu dan Kelompok

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Sidenreng Rappang memberikan dampak yang sangat baik terhadap masyarakat yang tergolong dalam keluarga miskin karena dapat membantu untuk meningkatkan taraf kehidupannya agar terlepas dari jeratan kemiskinan. Melalui bantuan ini, keluarga yang termasuk penerima manfaat mendapatkan bantuan dalam bentuk tunai yang diperoleh 4 kali dalam 1 tahun. Bantuan tersebut dipergunakan di bidang Pendidikan dan Kesehatan. Selain itu mendorong masyarakat lebih mandiri sehingga bisa mendapatkan penghasilan sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Melalui Program ini pemerintah berharap tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera dapat tercapai.

b) Perubahan dan Penerimaan Masyarakat

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan diterima sangat baik oleh masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang karena program ini dapat membantu mereka untuk mendapatkan fasilitas Pendidikan dan Kesehatan. Untuk mencapai perubahan terhadap keberhasilan program untuk mengurangi angka kemiskinan, Program PKH ini memberikan kewajiban kepada penerima bantuan PKH yakni wajib sekolah untuk anak usia 7-15 tahun serta balita, ibu hamil dan lansia disabilitas dibawa ke fasilitas Kesehatan untuk mendapatkan layanan Kesehatan. Di Kabupaten Sidenreng Rappang terjadi penurunan angka kesimikinan yakni tahun 2021 tingkat kemiskinan sebesar 14,28% atau sekitar 24.390 jiwa sedangkan tahun 2022 sebesar 12,96% atau sekitar 22.147 jiwa.

Keterbatasan Penelitian: penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu jarak yang jauh ke setiap kecamatan sehingga membuat peneliti mengalami kesulitan saat ingin melakukan wawancara kepada masyarakat yang ada di desa.

Arah Masa Depan Penelitian/Future Work: Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menemukan hasil yang lebih mendalam dan terperinci. Dan peneliti memberikan beberapa saran terkait penelitian kedepannya yaitu:

1. Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang melalui Dinas Sosial perlu melakukan upaya untuk mencapai perubahan yang diinginkan agar target RPJMN tahun 2022-2024 sebesar 7%-6,5% dapat dicapai dalam rangka mengurangi angka kemiskinan yang ada.
2. Pendamping PKH dan keluarga penerima perlu meningkatkan koordinasi agar muncul kesadaran masyarakat untuk mengikuti sosialisasi dan pendampingan terkait pemutakhiran data sehingga tidak terjadi status *invalid* yang mempengaruhi pencairan bantuan.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi teratur sehingga mudah untuk memantau perkembangan dan mengidentifikasi masalah yang muncul agar mengetahui efektivitas program dan menentukan langkah yang dilakukan agar pelaksanaan PKH dapat berjalan dengan efektif.

V. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih terutama ditujukan Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. Daftar Pustaka

- Indrayani, F. K. (2014). Efektivitas Program Keluarga Harapan di Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun. *Publika*, 2(3).
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Nazir, M. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2015). Peran perlindungan sosial dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia: Studi kasus program keluarga harapan. *Sosiohumaniora*, 17(1), 21-27.
- Virgoreta, D. A. (2015). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Beji Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban) (Doctoral dissertation, Brawijaya University).

